

DAFTAR RUJUKAN

BUKU :

- Beni Satria dan Redyanto Sidi Jambak, 2022, Hukum Pidana Medik dan Malpraktik, Canttleya Darmaya Fortuna, Medan
- Suharto. Edi, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan., Bandung:Alfabeta, 2009.
- Pelayanan Publik , Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2012.
- Moenir, H.A.S. 2014. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- M. Busrizalti. 2013. Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya. Yogyakarta: Total Media
- Atsar, A., & Apriani, R. (2019). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish.
- Panggabean, H. (2020). *Buku Ajar Etika Dan Hukum Kesehatan*.
- Ansori, M. (2020). *Dimensi HAM dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Iaifa Press.
- Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Afabeta Kristiani, Celina Tri Siwi 2017, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika
- Lonto, A. L., Lolong, W., & Pangalila, T. (2016). *Buku: Hukum Hak Asasi Manusia*. Ombak.
- Denny, J. A. (2014). *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi*. Cerah Budaya Indonesia.
- Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2019, December). Etika kedokteran & hukum kesehatan. EGC.
- Hidana, R., Ihwanudin, N., & Hadi, I. (2020). *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan (Vol. 4)*. Penerbit Widina.
- SA, A. W. G., & SH, M. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi.
- Zaeni, A. (2017). Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Rachmat, R. H. H. (2013). *Percepatan pembangunan kesehatan di Indonesia: melandaskan pada paradigma sehat dan pemikiran dasar pembangunan*

kesehatan serta dengan penguatan: pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan serta, perencanaan pengendalian, evaluasi dan kajian masa depannya. Gadjah Mada University Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

JURNAL/ ARTIKEL INTERNET :

Utami, L. F., & Ginting, L. (2022). KURANGNYA PELAYANAN TERHADAP PASIEN BPJS SEBAGAI KONSUMEN KESEHATAN. *KOLONI*, 1(4), 333-339.

Yefta, Y., & Widyorini, S. R. (2023). Pemenuhan Asas Persamaan Perlakuan atau Tidak Diskriminatif pada Pelayanan Publik Bagi Pasien Penyelenggara Jaminan Kesehatan. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 1-10.

Busro, A. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 1-18.

Kurniawan, Y., Pujiyanto, A., & Andayani, S. (2015). Analisis Perbedaan Pelayanan Kesehatan pada Pasien BPJS dan Pasien Umum (Non-BPJS). *Jurnal Dinamika Administrasi Bisnis*, 1(1).

Naili, Y. T., Anggraeniko, L. S., Ruhtiani, M., & Wahyuni, H. A. (2022, December). Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan berdasarkan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. In *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (pp. 615-623).

Flora, H. S. (2023). PERLINDUNGAN HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 154-164.

Agung Pujiyanto, Sri Andayani, Yudo Kurniawan. (2015). Analisis Perbedaan Pelayanan Kesehatan Pada Pasien Bpjs Dan Pasien Umum (Non-Bpjs).

- Agus Pramusinto, Lutfan Lazuardi, Trisna Widada. (2017). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu), Vol.23, Hal.199-216.
- Aida Mardatillah. "Seharusnya kewajiban kepesertaan BPJS dititikberatkan pada pemberdayaan masyarakat lemah dan tidak mampu." HukumOnline.Com. Last modified 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c35a640158bc/aturan-kewajiban-kepesertaan-bpjs-kesehatan-minta-dibatalkan/>.
- Afifah, Wiwik, dan Deasy N Paruntu. "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial." *Mimbar Keadilan* (2015).
- Retnaningsih, Hartini. "Prinsip Portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional." *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol 6, no. 2 (2018): 154.
- Fitri, I. (2020). *Perlindungan konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Yusri, M. (2011). Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 7(1).
- Yasirah, R. (2018). *Implementasi Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)(Studi Kasus di RSUDZA Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN RUMAH SAKIT ATAS KEIKUT SERTAAN DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
Ariawan Gunadi
- Solechan, S. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 686-696.
- Nurdiana, L. (2019). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN ATAS PERLAKUAN DISKRIMINASI OLEH RUMAH SAKIT HERMINA KOTA TANGERANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DIKAITKANDENGAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi kasus Bayi M. Rizki dengan Rumah Sakit Hermina Kota Tangerang).

- Ombudsman, 2023. “Pembatasan Layanan PASIEN BPJS Kesehatan Deskriminatif “. Dalam <https://ombudsman.go.id/news/r/pembatasan-layanan-pasien-bpjs-kesehatan-diskriminatif>. Diakses pada 1 Oktober 2023, pukul 00:13 WITA
- Agus, 2017. “Kisah Bayi Debora Dan Pentingnya Implementasi Ha Katas Kesehatan”. Dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/13/22582741/kisah-bayi-debora-dan-pentingnya-implementasi-hak-atas-kesehatan?page=all>. Diakses pada 7 November 2023, pukul 20:55 WITA
- Kompas.com, 2023. “Viral Video Nakes Bedakan Pasien BPJS Kesehatan, Dirut Tak Boleh Deskriminasi”. Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/20/20553311/viral-video-nakes-bedakan-pasien-bpjs-kesehatan-dirut-tak-boleh-diskriminasi>. Diakses pada 1 Oktober 2023, pukul 22:33 WITA
- Arnaiz, 2022. “Hak Asasi Di Bidang Kesehatan”. Dalam <https://bobo.grid.id/read/083317625/5-contoh-hak-asasi-di-bidang-kesehatan-materi-kelas-6-sdmi-tema-bumiku?page=all>. Diakses pada 7 November 2023, pukul 19:00 WITA
- World health organization, 2017. “PERNYATAAN BERSAMA PBB TENTANG MENGAKHIRI DISKRIMINASI DALAM LAYANAN KESEHATAN”. Dalam <https://www.who.int/news/item/27-06-2017-joint-united-nations-statement-on-ending-discrimination-in-health-care-settings>. Diakses pada 7 November 2023, pukul 20:57 WITA

